

# PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TEMBUNI DISTRIK TEMBUNI KABUPATEN TELUK BINTUNI

Oleh : ANTHONIUS IBORI

Sejak tahun 1999 dikeluarkan berbagai instrument hukum berupa undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP) yang membuka lebar ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan monitoring pembangunan. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana.

Selain undang-undang nomor 32 tahun 2004, berbagai peraturan yang secara sektoral memberikan ruang bagi partisipasi publik diantaranya undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dan masih banyak lagi peraturan yang secara sektoral mengatur partisipasi masyarakat. Semua peraturan tersebut pada intinya memberikan ruang yang sangat luas pada partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik dan implementasinya.

## A. Latar Belakang

Partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan di negara-negara yang menerapkan demokrasi termasuk di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sebagai suatu konsep dan praktek pembangunan, konsep partisipasi baru dibicarakan pada tahun 60-an ketika berbagai lembaga internasional mempromosikan partisipasi dalam praktek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi.

Presiden Suharto sejak tahun 1966 menerapkan konsep partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan sesuai dengan paradigma pemerintahan orde baru yang sentralistik, seluruh kebijakan

pembangunan dilakukan secara “top-down”. Inisiatif dalam menetapkan kebijakan pembangunan berasal dari atas (pejabat berwenang) tanpa melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya. Dalam kaitan ini, masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam membantu dana maupun tenaga. Pada saat itu partisipasi dipandang sebagai proses mobilisasi yaitu penggerakkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Meskipun model ini memiliki keunggulan karena pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara cepat, namun kelemahan yang dijumpai adalah masyarakat sering merasa tidak memiliki dan tidak merasakan manfaat dari kegiatan pembangunan itu.

Sejak tahun 1999 dikeluarkan berbagai instrument hukum berupa undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP) yang membuka lebar ruang

bagi partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan monitoring pembangunan. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana.

Selain undang-undang nomor 32 tahun 2004, berbagai peraturan yang secara sektoral memberikan ruang bagi partisipasi publik diantaranya undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dan masih banyak lagi peraturan yang secara sektoral mengatur partisipasi masyarakat. Semua peraturan tersebut pada intinya memberikan ruang yang sangat luas pada partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik dan implementasinya.

Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pembangunan yang terlalu menekankan peranan pemerintah birokrasi (bercirikan top down) mendapat kritikan tajam, dimana kurang peka terhadap kebutuhan lokal Korten (1988:87). Dari pada itu, pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya.

Kabupaten Teluk Bintuni dalam menunjang kegiatan pembangunannya, maka visi dan misi yang harus dicapai adalah peningkatan kinerja pembangunan daerah. Oleh karena itulah, dalam menunjang visi dan misi tersebut, maka keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi hasil pembangunan sangat penting utamanya di tingkat desa.

Namun jika kita melihat ke belakang, bahwa mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas (Bottom-Up) ternyata tidak banyak menjanjikan as-

pirasi murni warga desa/kelurahan didengar. Begitu pun halnya dalam pelaksanaan proyeknya yang masih menggunakan sistem tender, di mana tender yang dimaksud melibatkan para kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang basisnya tentu berada di desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa, ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan. Misalnya, partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah (desa/ Kelurahan) kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan mulai dari musrenbang des/kel hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama, sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud.

Bila demikian adanya, maka realita ini tentu saja dapat menghambat jalannya proses pembangunan yang melibatkan masyarakat di dalamnya (partisipatif). Padahal, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa macetnya pembangunan partisipatif akan memunculkan pola-pola pembangunan yang tidak aspiratif. Hal tersebut di atas kemudian memunculkan pertanyaan di Kabupaten Teluk Bintuni, khususnya di desa Tembuni Distrik Tembuni apakah partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan telah terlaksana dengan baik, di mana masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, akan tetapi telah menjadi subyek pembangunan. Dengan maksud bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusiasme masyarakat dalam menghadiri Musrenbang, akan tetapi, bagaimana kepentingan mereka telah direspon oleh pemerintah, serta bagaimana proses pelibatan mereka baik dalam tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan proyek pembangunannya. Karena antusiasme masyarakat kemudian lahir ketika substansi dari proses pembangunan itu telah tercipta.

Melalui penelitian awal, ditemukan bahwa meski dalam pelaksanaan pembangunan yang telah terlaksana di desa Tembuni masih belum mencapai substansi pembangunan partisipatif baik itu dalam tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan, namun setelah adanya beberapa program pemberdayaan masyarakat di desa tersebut, semangat parti-

sipasi masyarakat masyarakat kembali tumbuh. Beberapa program tersebut telah memunculkan kembali semangat gotong royong masyarakat, terutama program PNPM Mandiri pedesaan. Berdasar pada uraian dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam judul: “Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tembuni Distrik Tembuni Kabupaten Teluk Bintuni”.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah sangat penting dalam suatu penelitian agar diketahui arah jalan penelitian tersebut. Arikunto (1993:17) menguraikan bahwa agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka penulis harus merumuskan masalahnya, sehingga jelas dari mana harus memulai, ke mana harus pergi, dan dengan apa ia melakukan penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tembuni Distrik Tembuni?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Dengan demikian, pada dasarnya tujuan penelitian memberikan informasi mengenai apa yang akan diperoleh setelah selesai melakukan penelitian (Hasan, 2002:44). Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yakni: “Untuk Mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tembuni Distrik Tembuni”.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, yakni memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama mereka yang secara serius mengamati jalannya partisipasi masyarakat, serta memberikan masukan bagi masyarakat khususnya di tempat penelitian ini dilaksanakan agar dapat terus meningkatkan peran aktifnya dalam membangun daerahnya.
2. Secara akademis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak bagi kepastakaan jurusan Ilmu pemerintahan dan bagi kalangan penulis lainnya

yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang model partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan di daerah lain.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Seorang ilmuwan yang bernama Keith Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutip oleh R.A. Santoso Sastropoetro (1988:13) sebagai berikut: “Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.” Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok.

Sejalan dengan pendapat di atas, Gordon W. Allport (Santoso Sastropoetro, 1988:12) menyatakan bahwa:

“Seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, dengan keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya.” Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka ada tiga buah unsur penting dalam partisipasi yaitu:

1. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Ketersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
3. Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa partisipasi menyangkut keterlibatan diri/ego dan tidak semata-mata keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas saja, dan ketiga unsur partisipasi tersebut di dalam realitanya tidak akan terpisahkan satu sama lain, tetapi akan saling menunjang. Dalam realitasnya, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, istilah partisipasi ini sering dikaitkan dengan usaha di dalam mendukung program pembangunan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan

oleh Santoso S. Hamidjoyo (1988:67), bahwa partisipasi mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Partisipasi berarti turut memikul beban pembangunan.
2. Menerima kembali hasil pembangunan dan bertanggung jawab terhadapnya.
3. Partisipasi berarti terwujudnya kreativitasnya dan otonomitasnya.

Menurut Davis, seperti yang dikutip oleh Sastropoetro (1988:16), mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Pikiran (Psychological participation).
2. Tenaga (Physical participation).
3. Pikiran dan tenaga (Psychological dan Physical participation).
4. Keahlian (Participation with skill).
5. Barang (Material participation).
6. Uang (Money participation).

Menurut Sherry R. Arnstein dalam Suryono (2001: 127) memberikan model delapan anak tangga partisipasi masyarakat (Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation). Hal ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat di sebuah negara.

Menurut Davis dalam Sastropoetro (1988:16-18) prasyarat untuk dapat melaksanakan partisipasi secara efektif adalah sebagai berikut:

1. Adanya waktu.
2. Kegiatan partisipasi memerlukan dana perangsang secara terbatas.
3. Subyek partisipasi hendaklah berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya.
4. Partisipan harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam arti kata yang bersangkutan memiliki pemikiran dan pengalaman yang sepadan.
5. Kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik.
6. Bebas melaksanakan peran serta sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
7. Adanya kebebasan dalam kelompok, tidak adanya pemaksaan atau penekanan.

## **B. Konsep Pembangunan**

Todaro (2000:18), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro (2000:20), mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus

peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Todaro (2000:21), definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa:

1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga pemerataan.
2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan:
  - a. Life sustenance : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
  - b. Self-Esteem : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak “diisap” orang lain.
  - c. Freedom From Survitude : Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi populer (Todaro, 2000:24), yaitu:

1. Capacity, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau produktifitas.
2. Equity, hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah.
3. Empowerment, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.
4. Sustainable, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.

Menurut Rostow dalam Arief (1996: 29) pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak jenis output dari pada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci di antara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih (Arief, 1996:30). Menurut Gant dalam Suryono (2001:31), tujuan pembangunan ada dua tahap. Pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit (dalam Suryono, 2001:32) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam per-

encanaan pembangunan, yaitu, Pertama, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara. Sondang P. Siagian, (1981:21) mendefinisikan pembangunan adalah: "Suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa." Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai.

### **C. Ciri-ciri dan Prinsip Pembangunan Desa**

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil, (1983:251) yaitu :

1. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.
2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat.
3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.
4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan na-

sional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.

5. Menggerakkan partisipasi, prakaras dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu.

Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Narbuko & Achmadi (2004:44) memberikan pengertian penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif. Hadari Nawawi (2007:33), mengungkapkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Selain itu, penelitian deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.

### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Tembuni. Desa ini penulis pilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan penelitian awal desa Tembuni merupakan salah satu desa yang memiliki masyarakat yang mempunyai semangat gotong royong yang baik. Fokus utama penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain: literatur yang relevan dengan judul penelitian, misalnya materi atau dokumen-dokumen dari kantor Desa Tembuni, serta karya tulis yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini,

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Tembuni

Dalam pelaksanaan proyek yang dilaksanakan oleh PNPM-MP di desa Tembuni Kecamatan Tembuni, proyek yang akan dilaksanakan tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh tim pelaksana kegiatannya ataupun oleh pemerintah desa setempat melainkan dengan melakukan penggalan gagasan yang mendalam dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung semua, seperti yang telah dikemukakan oleh Ketua BPD Tembuni :

“Dalam penggalan usulan, digali dari setiap dusun, apakah di satu dusun itu dilakukan hanya sekali ataukah lebih dari sekali dengan titik lokasi yang berbeda, bergantung dari kondisi geografis dusun tersebut (susah dijangkau karena medannya yang sulit ataukah factor lainnya) ini supaya semua kebutuhan masyarakat yang mendesak dapat ter-cover”

Demikian juga yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh masyarakat desa Tembuni : “Pada PNPM Mandiri pedesaan penggalan gagasannya dilaksanakan mulai tingkat dusun hingga tingkat desa”

Ditambahkan lagi bahwa: “PNPM kan memang pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memang harus terlibat” Informasi tersebut menunjukkan bahwa proyek yang dilaksanakan oleh PNPM-MP benar merupakan proyek yang idenya digali dari masyarakat desa Tembuni dan telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari proses penggalan gagasan tersebut, maka lahirlah beberapa usulan yang akan mewakili kebutuhan masyarakat, yang selanjutnya akan diranking sesuai dengan skala kebutuhan masyarakat dan dimusyawarahkan dalam musyawarah tingkat desa.

PNPM-MP merupakan program yang mem-

punyai transparansi yang baik serta mengupayakan keterlibatan penuhnya masyarakat di dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu proyek yang telah didapatkan oleh desa Tembuni dari adanya program PNPM-MP, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat untuk membahas langkah apa yang sebaiknya dilakukan agar proyek dapat terlaksana dengan baik dengan memperhatikan kualitas dari proyek tersebut.

Dalam pelaksanaan proyek secara teknis juga tidak dapat terlepas dari pemanfaatan sumberdaya yang terdapat di desa bersangkutan. Hal ini dicekualikan jika sumberdaya yang dimaksudkan tidak terdapat di desa, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dusun I :

“Semua pekerja proyek adalah orang asli desa, misalnya bagi yang memiliki keahlian sebagai tukang batu, silahkan kerjakan yang bagian pemasangan batu, lagian tetap diberi upah kerja. Dan sebagai partisipasi mereka, maka upah yang mereka minta pun tidak seperti jika mereka bekerja biasanya”

Hal senada juga dikemukakan oleh Ketua BPD Tembuni :

“Untuk masalah pengerjaan yang sifatnya membutuhkan keahlian, maka dicari pula masyarakat di desa ini yang betul-betul ahli dalam bidang tersebut” Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan proyek dari PNPM-MP memang menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan, karena tanpa adanya sosialisasi, maka kendati terdapat minat masyarakat dalam berpartisipasi akan tetap menyurutkan hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran informasi ditemukan bahwa di lokasi penelitian, perhatian pemerintah desa dalam mengarahkan masyarakat sangatlah baik serta dalam setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan asalkan proyek tersebut jelas seperti proyek dari PNPM-MP pemerintah desa selalu melakukan sosialisasi yang baik, seperti yang disampaikan salah seorang tokoh masyarakat bahwa :

“Setiap ada sesuatu yang akan dikerjakan, misalnya membicarakan masalah pembangunan, maka pemerintah desa selalu menyampaikan kepada masyarakat, mereka tak bertindak sendiri”

Pernyataan ini juga diperkuat oleh keterangan dari Ketua BPD Tembuni :

“Saya juga salut kepada pemerintah desa Tembuni, bahwa mereka benar-benar terlibat dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Misalnya, setiap kegiatan mereka selalu hadir dan di sanalah mereka member sosialisasi, sehingga tak adalagi isti-

lah bahwa masyarakat tidak tahu”

Informasi tersebut menunjukkan bahwa dukungan pemerintah desa dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa sangat baik begitu pula dengan penyambutan dari masyarakat yang begitu antusias dalam setiap kegiatan pembangunan.

Dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Tembuni Kecamatan Tembuni yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat, maka tingkat antusiasme masyarakat desa dalam berpartisipasi dapat disandingkan, sehingga dapat melahirkan pembangunan desa sesuai dengan yang menjadi harapan, yakni pembangunan partisipatif yang sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita the founding father negeri ini serta menjadi pembenaran tentang teori pembangunan yang sifatnya bottom up (dari bawah ke atas). Meskipun demikian halnya, namun dalam pelaksanaan proyek PNPM-MP tersebut masih belum dapat terlepas dari adanya hambatan. Seperti yang didapatkan pada lokasi penelitian di mana main set dari masyarakat mengenai proyek pembangunan yang masih selalu berfikir bahwa setiap proyek pembangunan merupakan hal yang mendatangkan untung bagi tim pelaksanaannya meski pun tidak demikian adanya, seperti informasi yang disampaikan oleh tim pelaksanaan kegiatan PNPM-MP bahwa:

“Hanya saja di PNPM kendalanya adalah masyarakat kadang mengira bahwa pengerjaan PNPM seperti pengerjaan proyek yang biasanya, dalam artian bahwa mereka kadang berpikir bahwa pengurus PNPM pasti mendapat banyak untung, misalnya kalau ada sisa dana pasti kami yang akan mengambil sisa dana tersebut, padahal yang kami dapat hanyalah upah operasional saja”

Munculnya pembahasan proyek pembangunan dari PNPM-MP dalam skripsi ini dikarenakan oleh proyek pembangunan yang dikontrol oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melalui mekanisme penggalan gagasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) ternyata belum berjalan sesuai dengan yang telah dikonsepsikan dan masih terdapat banyak celah terutama dalam hal pelaksanaan proyeknya yang masih menggunakan pihak ketiga dalam hal ini kontraktor, sehingga mustahil untuk menghadirkan partisipasi masyarakat di dalamnya, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa bahwa :

“Dalam proyek pembangunan dari pemerintah daerah yang ditangani oleh BAPPEDA dengan menggunakan pihak ke-3, jangankan partisipasi masyarakat dalam bentuk, tenaga, keahlian, barang, atau uang, partisipasi masyarakat dalam bentuk piki-

ran pun tidak ada. Sangat tidak menarik, hanya saja masyarakat tidak dapat menolak. Berbeda dengan program pembangunan yang ditangani oleh PNPM Mandiri pedesaan yang ada di desa ini, masyarakat sangat antusias dalam pelaksanaan program/proyek pembangunannya, karena betul-betul melibatkan masyarakat, mulai dari mengumpulkan masyarakat dan membicarakan bersama mengenai program/proyek yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat betul-betul berpartisipasi, mulai dari pikiran, tenaga, keahlian, barang kalau dibutuhkan, bahkan uang sekalipun”

Demikian pula yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat bahwa :

“Kalau untuk proyek pembangunan yang diturunkan dari hasil Musrenbang yang kemudian pelaksanaannya dikerjakan oleh kontraktor memang partisipasi masyarakat tidak ada”

Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa jika proyek dari hasil MUSRENBANG yang akan dijadikan sebagai unit analisis untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat, maka akan menjadi hal yang mustahil dilakukan, sehingga dengan demikian mesti ada opsi lain yang dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti, yaitu dengan menjadikan salah satu proyek dari PNPM-MP yang diperoleh desa Tembuni sebagai tolak ukurnya dalam hal ini proyek yang dianggarkan untuk tahun 2011, yakni pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) yang selanjutnya secara kualitatif ditelusuri melalui dimensi-dimensi sebagaimana dikemukakan oleh Davis yang dikutip oleh Sastropetro (1988:16), terdiri atas: partisipasi pikiran; partisipasi tenaga; partisipasi keahlian; partisipasi barang; dan partisipasi uang.

#### 1. Partisipasi Pikiran

Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pekerjaan proyek PNPM-MP bukanlah hal mudah. Hal ini karena, masyarakat selalu beranggapan bahwa proyek-proyek PNPM-MP merupakan proyek pemerintah yang pada dasarnya mempunyai anggaran yang cukup untuk melaksanakan proyek-proyek PNPM-MP tersebut. Olehnya itu, setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan proyek-proyek itu harus mendapat upah. Tidak terkecuali proyek pembangunan POSYANDU. Hal ini wajar karena unsur partisipasi menurut Keith Davis salah satunya adalah keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari pada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah. Pada awalnya, masyarakat Desa Tembuni cenderung tidak mau berpartisipasi. Namun setelah mendapat pengarahan dari Kepala Desa beserta aparatnya, juga tokoh-tokoh maka masyarakat mulai memahami

dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pelaksanaan proyek POSYANDU. Partisipasi masyarakat dimaksud merupakan wujud kerjasama antara pemerintah desa dengan warga desanya. Dijelaskan oleh Kepala Desa Tembuni bahwa:

“Memperjuangkan pengadaan POSYANDU di Desa Tembuni bukanlah upaya baru. Masyarakat Desa Timoreng Panua sangat membutuhkan adanya Pos Pelayanan Terpadu - Mandiri Pedesaan. Akhirnya upaya tersebut baru terealisasi pada tahun 2011. Keputusan tentang pengadaan POSYANDU bukanlah merupakan keputusan Kepala Desa dan aparatnya saja melainkan merupakan hasil keputusan Musyawarah Desa yang pada dasarnya merupakan masukan dari warga desa utamanya tokoh-tokoh masyarakat”

Ungkapan Kepala Desa tersebut menunjukkan bahwa masyarakat utamanya para tokohnya senantiasa memikirkan tentang kebutuhan bersama warga desa mereka yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan mereka, yaitu Kepala Desa untuk diperjuangkan pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Keinginan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat tersebut, tentu bukan juga merupakan pemikiran dan keinginan mereka sendiri, akan tetapi itu juga merupakan keinginan warga desa secara keseluruhan. Kepala Desa Tembuni, juga menginformasikan, bahwa:

“Secara jujur harus diakui bahwa masih terdapat sebagian warga desa kami yang meskipun telah disosialisasikan dan bahkan secara langsung diajak untuk ikut serta berpartisipasi, namun mereka tetap berpendirian bahwa proyek PNPN-MP yang dalam hal ini adalah pembangunan POSYANDU telah ada anggarannya sehingga bila mereka bekerja harus mendapat upah sebagaimana lazimnya”

Selain partisipasi dalam bentuk pemikiran yang disampaikan sebagai masukan dalam rangka memperoleh bantuan proyek, sebagian masyarakat juga memberikan masukan pikiran-pikiran teknis dalam rangka pelaksanaan fisik bangunan POSYANDU. Antara lain partisipasi (pikiran) dengan mengusulkan agar dana sisa dari bangunan tersebut dimanfaatkan untuk membangun pagar gedung POSYANDU. Masukan ini selanjutnya diterima oleh Kepala Desa dan selanjutnya dibangunlah pagar di bagian depan dan samping bangunan POSYANDU. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat Desa Tembuni, bahwa:

“Pada saat bangunan POSYANDU dikerjakan, banyak anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya, tanpa dibayar. Mereka datang bekerja karena

menyadari bahwa POSYANDU merupakan kebutuhan bersama dan pasti akan memberikan pelayanan kepada semua masyarakat tanpa membedakan antara warga yang satu dengan warga yang lainnya. Mereka juga memberikan petunjuk-petunjuk teknis sehingga POSYANDU dapat terselesaikan sebagaimana diharapkan.”

## 2. Partisipasi Tenaga

Selain partisipasi dalam bentuk pemikiran, tenaga merupakan salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat desa yang sangat potensial diarahkan dalam proses pembangunan desa, khususnya dalam pengerjaan proyek-proyek fisik PNPM-MP. Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di pedesaan dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan atas dasar gotong-rotong atau swadaya. Dengan dana yang terbatas, mereka mampu dan berhasil menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan fisik yang mahal, misalnya rumah ibadah, balai desa, bahkan sekolah dan lain sebagainya. Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa mengarahkan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desanya tidak semata-mata tergantung pada aspek anggaran. Kepemimpinan juga merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan tingkat partisipasi masyarakat desa. Artinya, Kepala Desa beserta aparatnya harus mampu menjalankan roda pemerintahan desa secara jujur, transparan, akuntabel dan religius. Dengan demikian masyarakat yang dipimpin akan cenderung untuk mengikuti arahan pemerintah desa guna menyumbangkan tenaga mereka dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di desanya.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak bahwa banyak anggota masyarakat yang terlibat dalam pengerjaan gedung POSYANDU atas dasar kesadaran bahwa keberadaan POSYANDU sangat bermanfaat bagi warga Desa Tembuni. Olehnya itu, meskipun tersedia anggaran untuk pembangunan tersebut, namun mereka tidak berharap untuk dibayar. Di lain pihak, sebagaimana dikemukakan juga oleh salah seorang tokoh masyarakat bahwa pada dasarnya semua masyarakat Desa Tembuni ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek-proyek PNPM-MP, terutama dalam bentuk partisipasi tenaga.

Memang harus diakui bahwa masyarakat Desa Tembuni dapat dikatakan cukup partisipatif dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan desanya. Akan tetapi harus diakui pula bahwa masih banyak diantara mereka yang harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Demikian antara lain dikemukakan oleh seorang Kepala Dusun,

bahwa:

“Di Dusun I, banyak warga yang tidak sempat berpartisipasi karena memang di Dusun I masih banyak warga yang kalau mereka tidak bekerja dalam beberapa hari, maka mereka tak akan bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan mereka, dan mata pencaharian yang paling dominan adalah bekerja untuk memanen sawah orang lain dengan diberi upah dan kadang itu di luar daerah, jika di daerah sendiri tidak ada musim panen. Hal ini dikarenakan mereka tak punya ladang sendiri untuk mereka garap sedangkan keahlian mereka adalah seperti itu”.

Informasi tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi seseorang di dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bukanlah merupakan paksaan, akan tetapi kerelaan untuk terlibat. Kerelaan itu sendiri muncul dari kesadaran bahwa keterlibatan mereka dalam bentuk partisipasi tenaga itu adalah suatu upaya untuk mewujudkan

kemaslahatan bagi orang banyak. Seperti yang di kemukakan oleh kepala dusun, bahwa : “Masyarakat mau ikut berpartisipasi Karena mereka berpikir selain mereka ingin melihat pembangunan di daerahnya baik juga mereka berpikir bahwa hal tersebut juga bermanfaat bagi diri mereka”

### 3. Partisipasi Keahlian

Menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien serta berkualitas sangat ditentukan oleh tingkat keahlian (skill) yang dimiliki oleh para pekerjanya. Keahlian tersebut juga harus ditunjang pula dengan motif dan kondisi kejiwaan dari para pekerja pada saat mereka bekerja. Hal ini penting dikemukakan mengingat partisipasi adalah keterlibatan atas dasar kerelaan yang akan mewujudkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Dikemukakan oleh Ketua BPD Tembuni, bahwa:

“Bila dibandingkan proyek-proyek pembangunan di desa ini yang dilaksanakan oleh pihak ke-3 dengan proyek pembangunan yang ditangani oleh PNPM Mandiri Pedesaan yang melibatkan masyarakat, akan sangat berbeda. Proyek yang dilaksanakan oleh pihak ke-3 sudah mulai rusak meski baru beberapa lama selesai pengerjaannya sedangkan yang dilaksanakan oleh PNPM kualitasnya lebih bagus, karena memang melibatkan tukang terbaik di desa ini yang juga turut berswadaya”.

Informasi ini mengindikasikan bahwa: (a) terdapat partisipasi masyarakat dalam bentuk keahlian; (b) tanggung jawab terhadap kualitas hasil, lebih tinggi pada proyek PNPM-MP dibandingkan dengan hasil yang ditunjukkan oleh proyek-proyek yang ditangani oleh pihak ke-3; dan (c) pemelihara-

an terhadap proyek PNPM-MP lebih baik dari pada pemeliharaan terhadap hasil-hasil proyek yang ditangani oleh pihak ketiga. Hal ini dapat dimaklumi, karena proyek PNPM- MP oleh masyarakat Desa Tembuni dianggap sebagai milik sendiri, sedangkan proyek yang ditangani pihak ke-3 dianggap sebagai milik negara atau daerah yang harus dijaga dan dirawat oleh negara atau daerah. Sesuai yang dikemukakan oleh Kepala Dusun, bahwa:

“Semua pekerja proyek adalah orang asli desa, misalnya bagi yang memiliki keahlian sebagai tukang batu, silahkan kerjakan yang bagian pemasangan batu, lagian tetap diberi upah kerja. Dan sebagai partisipasi mereka, maka upah yang mereka minta pun tidak seperti jika mereka bekerja biasanya”.

Ungkapan itu menunjukkan bahwa kerelaan masyarakat untuk menyumbangkan keahlian mereka dalam pembangunan desanya adalah cukup tinggi. Mereka tetap bekerja dengan baik, meskipun upah yang mereka terima seadanya saja. Artinya upah bukanlah faktor utama dalam berpartisipasi, melainkan kesediaan mereka untuk bekerja sama dalam rangka mewujudkan tujuan bersama. Sebagai pimpinan, maka seyogyanya Kepala Desa Tembuni beserta jajarannya melihat potensi keahlian dan kerelaan bekerja ini sebagai suatu kekuatan yang dapat diorganisir dan dimobilisasi secara efektif sehingga dapat bermanfaat bagi mereka dalam rangka memperoleh pendapatan yang lebih baik. Dikemukakan pula oleh Kepala Dusun, bahwa:

“Di desa Tembuni khususnya di dusun I, partisipasi masyarakat yang dapat dilihat adalah dominan partisipasi tenaga dan juga partisipasi keahlian dari masyarakat yang memiliki keahlian misalnya sebagai tukang batu dan tukang kayu, dan keahlian lainnya, yang bila diperlukan maka mereka akan siap untuk bekerja sebagaimana yang diharapkan”.

Informasi dari Kepala Dusun I ini menunjukkan bahwa warga desa Tembuni khususnya kaum laki-laki yang berada di Dusun I banyak yang memiliki keahlian sebagai tukang batu, tukang kayu dan keterampilan teknis lainnya yang mereka peroleh dari pengalaman langsung di lapangan. Banyak diantara mereka tidak memiliki tingkat pengetahuan yang memadai. Dengan keahlian yang mereka miliki, dapat dimanfaatkan dan diarahkan secara optimal dalam rangka pengerjaan proyek-proyek PNPM-MP dimasa yang akan datang.

### 4. Partisipasi Barang

Barang yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah barang-barang yang dimiliki oleh warga desa yang secara sukarela disumbangkan kepada desa

dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek PNPM-MP. Pada pertemuan Desa, oleh Kepala Desa Tembuni menyampaikan secara transparan jumlah dana. Beliau menyampaikan bahwa untuk pengadaan POSYANDU yang memadai, tentunya dana tersebut belumlah cukup. Olehnya itu, diharapkan kesediaan warga untuk dapat menyumbangkan bahan-bahan tertentu yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan fisik POSYANDU tersebut. Himbuan ini ternyata mendapat sambutan positif dari beberapa warga dan tokoh masyarakat. Sambutan positif dimaksud adalah pemberian secara sukarela beberapa bahan (kayu, paku, pasir dan lain-lain) yang dibutuhkan pada saat dibutuhkan dalam pengerjaan POSYANDU.

Dari bantuan-bantuan dimaksud maka pengeluaran pembangunan fisik POSYANDU dapat ditekan dan selanjutnya digunakan untuk pengadaan pagar di bagian depan dan bagian samping POSYANDU. Dikemukakan oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan PNPM-MP, bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam bentuk barang, misalnya untuk proyek 2011, yakni pembangunan Posyandu, jadi tanah yang digunakan sebagai lokasinya adalah hasil dari swadaya masyarakat dalam bentuk barang, contohnya lagi untuk proyek 2010, yakni perintisan jalanan, itu juga diswadayakan dan tanah yang digunakan adalah tanah yang dihibahkan dari masyarakat yang panjangnya kurang lebih 350 m, selain itu alat-alat yang digunakan pun adalah hasil dari partisipasi masyarakat”.

Informasi ini kiranya secara jelas memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Tembuni memiliki kesadaran dan kerelaan yang cukup memadai dalam rangka pembangunan desa mereka. Dipandang dari sudut ekonomi, sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang memiliki kekayaan yang berlebihan, sehingga sebagian dari harta mereka itu disumbangkan kepada desa. Akan tetapi, meskipun kehidupan mereka masih dalam taraf sederhana, mereka tetap rela untuk menyumbangkan sebagian dari milik mereka untuk kepentingan pembangunan desa khususnya pembangunan POSYANDU pada tahun 2011.

Dikemukakan oleh Kepala Dusun II, bahwa:

“Kalau dalam bentuk barang itu disediakan oleh tim pelaksana desa, begitu pula dengan dananya yang memang semuanya harus dihabiskan untuk pendanaan pembangunan tanpa adanya penyelewengan jika memang nantinya ada dana yang tersisa, karena semuanya harus dipertanggungjawabkan. Malahan dana yang tersisa dirembukkan lagi dengan masyarakat, bahwa sisa dana tersebut mau dipakai

untuk membiayai pembangunan yang mana lagi”, yang kemudian disepakati adalah untuk pembangunan pagar POSYANDU.

## 5. Partisipasi Uang

Diinformasikan oleh semua informan bahwa tidak terdapat partisipasi masyarakat Desa dalam bentuk uang pada saat pembangunan selama kurang lebih empat bulan dilaksanakan. Kalaupun ada, hal itu diwujudkan dalam bentuk rokok dan minuman seperti kopi, sirup dan lainnya untuk konsumsi bagi masyarakat yang turut terlibat dalam pengerjaan proyek. Selain itu, juga karena memang proyek dari PNPM-MP ini memiliki anggaran dana yang cukup yang dikelola dengan baik oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan juga berkat bantuan atau dalam artian partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangsi tenaga dan keahlian yang jika menggunakan pekerja sewa akan memakan biaya, sehingga dana yang dianggarkan akan terhemat dan dapat digunakan lagi untuk kebutuhan pembangunan lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan PNPM-MP Desa Tembuni, bahwa :

“Untuk partisipasi masyarakat dalam bentuk uang, selama ini belum pernah, Karena dana yang dianggarkan dari PNPM pun belum pernah kurang, malahan kadang memiliki sisa dari pengerjaan satu proyek yang dapat dijadikan revisi untuk proyek lain”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sisa dana dari pelaksanaan proyek posyandu, maka dapat dijadikan sebagai indikator bahwa tingkat partisipasi masyarakat di desa Tembuni sangatlah baik, sebagaimana yang salah satu alasan dari pentingnya partisipasi dalam kegiatan yang dikemukakan oleh Dr. Lastaire White dalam Sastropoetro 1988, yakni dengan partisipasi dari masyarakat, maka hasil kerja yang dicapai akan lebih banyak dibandingkan pengerjaannya dilakukan tanpa melibatkan masyarakat.

## P E N U T U P

### A. Kesimpulan

1. Meskipun masih terdapat hambatan-hambatan kecil dalam membangun dan mengarahkan partisipasi masyarakat Desa Tembuni, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa tersebut telah cukup memadai dalam rangka pelaksanaan proyek PNPM-MP di desa mereka.
2. Dari lima jenis partisipasi yang dikaji, ternyata bentuk partisipasi tenaga memiliki sumban-

gan yang sangat signifikan dalam pengerjaan proyek PNPM-MP khususnya pembangunan POSYANDU pada tahun 2011.

3. Kepala Desa Tembuni beserta aparatnya cukup aktif dan berhasil menjalankan fungsi dan perannya dalam mendorong dan mengarahkan partisipasi masyarakatnya sehingga cukup berhasil dalam menyelesaikan salah satu proyek PNPM-MP yaitu POSYANDU sebagaimana diharapkan oleh masyarakat desanya.

### B. Saran

1. Diharapkan agar Kepala Desa dan aparatnya semakin gigih dalam berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa guna mendapatkan proyek-proyek PNPM-MP sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat desanya.
2. Agar Kepala Desa beserta jajarannya semakin menjalin hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat dan dengan masyarakat desa secara keseluruhan sehingga pertemuan-pertemuan yang mereka selenggarakan di masa yang akan datang dapat melahirkan gagasan-gagasan dan keputusan-keputusan yang lebih baik guna menyukseskan setiap program dan proyek yang telah berhasil diperjuangkan oleh Kepala Desa.
3. Agar Kepala Desa dan aparatnya serta tokoh-tokoh masyarakat Desa Tembuni senantiasa bersinergi menjadi teladan bagi masyarakat dalam memelihara dan merawat hasil-hasil pembangunan yang dicapai di Desa Tembuni.

### DAFTAR PUSTAKA

Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.

Adi, Isbandia Rukminto. 2001. *Pemberdayaa, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Arif, Syaiful. 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*. Malang: Averroes Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arsyad, Lincoln. 2002. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPF.

Conyers, Diana. 1991. "An Introduction to Social Planning in The Third World". By Jhon Wiley & Sons Ltd. 1994. Terjemahan

Drs. Susetiawan. SU: "Perencanaan Sosial di Dunia

Ketiga: Suatu Pengantar". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. Hadari, Nawawi. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hasan, Iqbal M. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*. Jakarta: CIDEAS.

Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty.

Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga. Ndraha, Talizuduhu. 1987. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Nugroho, Riant. 2003. *Reinventing Pembangunan*. Jakarta: Gramedia. Sastropetro, Santoso R.A. 1988. *Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.

Supriatna, Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiono. 2004. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press.

Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*.

Tjokromidjojo, Bintoro. 1976. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga

Wrihatnolo, Randy R, dan Nugroho, Riant. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar Panduan*. Jakarta: Elekx Media Komputindo.